

Etika Kosmopolitan: Millenium Development Goals (MDGs) dan Solidaritas dalam Menanggulangi Kemiskinan Global

Mohamad Rosyidin

Universitas Diponegoro, Semarang

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang menjadi perdebatan di level internasional. Paradigma neoliberal menekankan pada program penyesuaian struktural sebagai solusi untuk mengatasinya. Namun pendekatan tersebut terbukti gagal dalam mengatasi kemiskinan global karena kesalahan dalam melihat persoalan kemiskinan. Oleh sebab itu, kemunculan MDGs menjadi revolusi gagasan, sekaligus revolusi tata-kelola kemiskinan global. Tulisan ini berupaya menganalisis MDGs dari sudut pandang kosmopolitanisme. Dalam tulisan ini kemiskinan tidak lagi dipandang sebagai masalah nasional melainkan masalah global, dimana semua negara baik kaya maupun miskin ikut bertanggung-jawab dalam upaya pemberantasan kemiskinan global. Solidaritas antar bangsa mencerminkan semangat kosmopolitan. MDGs merupakan manifestasi dari sikap altruisme negara. Tulisan ini juga menjelaskan proses perkembangan MDGs hingga menjadi norma global. Proses ini penting guna memahami bagaimana isu kemiskinan menjadi tanggung-jawab bersama semua bangsa.

Kata-kata kunci: MDGs, tata-kelola global, kemiskinan, kosmopolitanisme, norma.

Poverty is a classic problem that becomes never ending debate on international level. Neoliberal paradigm emphasizes on structural adjustment program as a solution to address it. In fact, this approach has evidently failed in overcoming global poverty due to its misconception about the problem of poverty. Therefore, the emergence of MDGs was the revolution of ideas as well as global poverty governance. This article seeks to analyze MDGs from the perspective of cosmopolitanism. The thesis of this article is that poverty is not a national problem but a global problem, in which all countries both rich and poor, are responsible to eradicate global poverty. Solidarity among nations reflects cosmopolitan spirit. MDGs are a manifestation of state altruism. This article also explains how MDGs become global norms. This process is a matter to understand how poverty becomes global responsibility of all nations.

Keywords: MDGs, global governance, poverty, cosmopolitanism, norms.

Hubungan internasional sering kali digambarkan sebagai dunia yang anarki dimana setiap negara bersaing untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing. Sejarah dalam hubungan internasional menerangkan tentang kecurigaan, kebohongan, suap-menyuap, ketidak-setiaan, kesombongan, penghianatan, eksploitasi, penjarahan, penindasan, penaklukan, genosida, dan masih banyak lagi (Cohen 1984, 299). Dalam hal ini, moralitas dianggap berbahaya bagi kepentingan nasional suatu negara. Pemerintah merupakan perwakilan bukan pemimpin, yang memiliki kewajiban untuk melayani kepentingan seluruh masyarakatnya, bukan dorongan moral yang berasal dari pengalaman masyarakat (Kennan 1985, 206). Negara berupaya mencapai kepentingan nasional guna mendapatkan keuntungan maksimal melalui berbagai metode, termasuk mengeksploitasi negara lain. Gambaran dunia (*weltanschauung*) berdasarkan paradigma realis mendominasi pemikiran hubungan internasional selama berpuluh-puluh tahun. Bahkan hingga kini pun, sulit untuk menjelaskan hakekat dunia di luar bingkai pemikiran tersebut.

Skeptisisme tersebut berimplikasi pada gagasan bahwa tidak ada kerjasama internasional yang berbasis pada solidaritas mekanis (*gemeinschaft*), yang didorong oleh altruisme. Neorealis dan liberal bertahan pada klaim bahwa kerjasama didorong oleh pertimbangan rasional. Dalam hal ini, kerjasama dilakukan sebagai instrumen untuk mendapatkan keuntungan maksimal bagi negara. Solidaritas yang terjalin tidak dilandasi oleh kewajiban, melainkan kepentingan atau solidaritas organis (*gesellschaft*). Aliansi dan *bandwagoning* misalnya dibentuk karena negara berusaha untuk mempertahankan keamanan nasionalnya dengan bergabung pada negara yang lebih kuat (Wolfers 1962; Waltz 1979, 166; Walt 1985).

Di samping itu, pakar konstruktivis berpendapat bahwa solidaritas dibentuk atas dasar kesamaan identitas, baik kultural, ideologis, sejarah, dan lain-lain. Identitas kolektif tersebut mengidentifikasi siapa yang termasuk dalam “in-group” dan “out-group” (Adler & Barnett 1998; Wendt 1999, 298-306). Konstruktivis terjebak pada pemikiran parokialisme yang memandang solidaritas internasional bersifat eksklusif. Sebagai contohnya, Uni Eropa bersatu karena diikat oleh kesamaan kultural sehingga menghalangi Turki untuk masuk ke dalamnya. Kenyataan tersebut membuktikan sulitnya menemukan solidaritas internasional inklusif yang berbasis pada kesamaan dan kesetaraan global.

Tulisan ini mengulas satu studi kasus yang menentang argumen mengenai ketiadaan solidaritas global. Millenium Development Goals (MDGs) menjadi bentuk solidaritas komunitas internasional terhadap isu kemiskinan di negara-negara berkembang. Literatur yang tersedia

mengenai hubungan antara moral kosmopolitan dan MDGs sangat sedikit. Visi MDGs untuk menghapuskan kemiskinan global dalam hal ini merupakan bagian dari konsep hak asasi manusia yang diperluas maknanya (Alston 2005; Nelson 2007; Andrews 2008). Selain itu, Saith (2006, 1184) dan Gore (2008) mengkritik bahwa meskipun MDGs dilandasi oleh nilai-nilai universal pendekatan yang dipakai tidak bersifat global. Masalah pembangunan justru cenderung dilokalisasi di negara-negara dunia ketiga. Kritik lainnya menyatakan bahwa tata kelola MDGs yang bersifat “top-down” memiliki agenda tersembunyi dari IMF dan Bank Dunia. Sehingga pada akhirnya tujuan global dalam pemberantasan kemiskinan hanya merupakan tipuan (Bond 2006, 341).

Dengan menggunakan perspektif kosmopolitanisme dalam tradisi pemikiran hubungan internasional, tesis dasar tulisan ini adalah kemiskinan tidak lagi dipandang sebagai masalah nasional melainkan masalah global dimana semua negara, baik kaya maupun miskin ikut bertanggung-jawab dalam upaya pemberantasan kemiskinan global. Solidaritas antar bangsa dalam hal ini mencerminkan adanya semangat kosmopolitan yang mengesampingkan kepentingan jangka pendek pemerintah. MDGs merupakan manifestasi dari sikap altruisme negara. Argumen ini tidak bermaksud menyingkirkan pendapat tentang sistem internasional yang anarki. Tulisan ini berupaya melihat bahwa moralitas dalam dunia yang anarki bukan suatu hal yang mustahil (Rosyidin 2012).

Tulisan ini menjelaskan kosmopolitanisme sebagai gagasan normatif dalam tradisi teoritis hubungan internasional. Pada dasarnya dalam pendekatan kosmopolitanisme terdapat perdebatan (*intra-paradigm debate*) mengenai upaya penyelesaian masalah-masalah global, menggunakan pola “top-down” atau pola “bottom-up”. Dalam tulisan ini MDGs menjadi salah satu bentuk upaya penyelesaian masalah global melalui pola “top-down”. Dalam penjelasan selanjutnya, penulis mengaitkan kosmopolitanisme dengan MDGs, dalam konteks bahwa MDGs mencerminkan komitmen moral komunitas internasional terhadap isu kemiskinan global sesuai pendekatan kosmopolitranisme. Hal tersebut juga menegaskan bahwa upaya penyelesaian kemiskinan dilakukan dengan menciptakan tata-kelola global.

Kosmopolitanisme dan Solidaritas Global

Istilah kosmopolitanisme erat kaitannya dengan “warga dunia” atau *world citizenship*. Dalm konteks tersebut, seseorang mengidentifikasi dirinya dengan tidak merujuk pada identitas atau nasionalisme tertentu. Gagasan tentang “warga dunia” yang menjadi inti ajaran kosmopolitanisme muncul sekitar abad keempat sebelum masehi di Yunani. Diogenes merupakan filsuf yang pertama kali menyebut frasa

“warga dunia” ketika Yunani terpecah menjadi dua negara-kota, Athena dan Sparta. Namun, menurut Linklater (2007, 109), gagasan tersebut sebenarnya hanya mencerminkan kritik Diogenes terhadap polis Yunani, bukan visi untuk membangun komunitas global umat manusia. Meskipun demikian, dari gagasan Diogenes itu lahir pemikiran tentang bagaimana membangun dunia yang ideal yang di dalamnya melindungi hak-hak individu manusia tanpa penindasan.

Kosmopolitanisme merupakan salah satu aliran pemikiran yang termasuk ke dalam induk teori normatif hubungan internasional. Sebagai teori yang bersifat normatif, kosmopolitanisme berkomitmen terhadap *praksis* hubungan internasional yakni dengan menawarkan solusi terhadap prospek transformasi global. Politik dunia harus dipahami sebagai etika global dan mencari prinsip-prinsip moral yang inklusif untuk merekonstruksi praktik hubungan internasional (Cochran 2004, 2). Seperti halnya teori normatif lainnya, kosmopolitanisme memandang dunia sebagai satu kesatuan dimana masalah yang dihadapi satu negara menjadi perhatian bagi semua negara di dunia. Argumen dasarnya adalah kegagalan negara-negara dalam menyelesaikan masalah global selama ini disebabkan oleh penolakan terus-menerus terhadap sistem sosial keduniaan (*planetary social system*) sebagai satu kesatuan (Miller 2006, 33). Negara terlalu sibuk dengan upaya untuk mencapai kepentingan nasional. Ketika suatu negara ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah global, tindakan tersebut merupakan hasil dari kalkulasi rasional. Kosmopolitanisme berupaya melepaskan negara dari “sangkar besi” kedaulatan dan relativisme kepentingan nasional. Semua pihak harus berempati dan saling membantu dalam menyelesaikan segala persoalan di dunia, karena persoalan di satu wilayah merupakan persoalan bersama.

Secara sederhana etika kosmopolitan dimaknai sebagai sikap moral, yang memandang bahwa semua individu mempunyai nilai dasar yang sama tentang konsep kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Meskipun pada dasarnya berbeda-beda, mulai dari fisik (ras), budaya (etnis), keyakinan (agama), pandangan hidup (filosofi dan ideologi), dan geografis (tempat tinggal). Martha Nussbaum (dalam Baban 2006, 105) menyatakan bahwa “Kita harus mengakui nilai kemanusiaan di manapun ia berada, menghormati dan mematuhi segala unsur-unsur dasarnya, serta kapasitas nalar dan moralnya”. Karena nilai kemanusiaan bersifat universal, maka semua pihak harus meletakkannya di atas nilai-nilai lain yang bersifat partikular atau parokial. Dengan konsekuensi batas-batas tradisional yang menegaskan perbedaan antara satu dengan lainnya menjadi tidak relevan lagi. Hal ini bukan berarti kosmopolitanisme ingin menghapus perbedaan yang sudah menjadi fitrah manusia. Akan tetapi, perbedaan itu tidak boleh menghalangi pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai yang dimiliki bersama. Seperti halnya pelangi yang

walaupun terdiri atas berbagai macam warna, sebenarnya itu adalah hasil dari pemendaran warna putih. Singkatnya, kosmopolitanisme menjunjung tinggi semangat solidaritas yang dibangun di atas prinsip kemanusiaan.

Pandangan kosmopolitanisme ini bertentangan dengan *moral favoritism* yang dibuat oleh J.J. Rousseau. Doktrin ini menyatakan bahwa sesuai dengan kewajiban hendaknya pemerintah suatu negara lebih memprioritaskan individu yang merupakan warga negara, ketimbang individu warga negara lain. Doktrin ini sesuai dengan praktik dalam hubungan internasional, dimana suatu negara mendahulukan kepentingan nasionalnya ketimbang kepentingan negara lain. Dalam etika kosmopolitan, tindakan yang didasarkan pada *moral favoritism* ini tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan dapat menghalangi inklusivisme negara. *Moral favoritism* justru membuat dunia terbelah menjadi dua kelompok yakni *in-group* dan *out-group*. Abad-21 yang ditandai dengan arus globalisasi yang semakin intensif membuat doktrin ini menjadi tidak relevan. Interaksi antar bangsa semakin meningkat, seiring dengan berbagai masalah yang mengikutinya, turut mendorong negara untuk lebih terbuka dalam menyikapi perkembangan global.

Dalam perkembangannya, kosmopolitanisme sendiri terbagi menjadi dua perdebatan; kosmopolitanisme *versus* komunitarianisme. Keduanya pada dasarnya berpegang pada komitmen terhadap perluasan kebebasan individu dan kewajiban moral antar individu namun instrumen yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan berbeda (Cochran 2004, 6). Kosmopolitanisme tidak percaya pada komitmen moral negara mengingat negara selalu bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri. Jalan keluar satu-satunya adalah melalui pemberdayaan individu yang terlepas dari sekat-sekat kedaulatan dan kepentingan nasional. Pola “bottom-up” ini pada umumnya dipakai oleh aktor non-negara, seperti kelompok masyarakat sipil yang berupaya memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Charles Beitz (1979) misalnya, berangkat dari pemikiran John Rawls tentang konsep keadilan distributif tidak mempercayai negara sebagai agen moral. Pandangan bahwa negara adalah aktor otonom tidak menyediakan landasan yang memadai untuk komitmen moral apapun. Sebaliknya, komunitarianisme percaya bahwa negara masih menjadi aktor penting dalam memperjuangkan nilai-nilai moral. Kelebihan yang dimiliki oleh negara dan tidak dimiliki aktor non-negara adalah kapasitasnya dalam proses pembuatan keputusan (Cochran 2004, 60). Negara juga berperan sebagai penjamin keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi individu. Distribusi barang publik masih menjadi *privilege* dan bagian yang tidak terpisahkan dari peran negara. Seperti pernyataan Andrew Linklater yang menyatakan bahwa universalisme moral setidaknya mengimplikasikan tiga kecenderungan negara, seperti: meningkatnya komitmen perlindungan terhadap hak asasi manusia,

kebutuhan untuk melakukan tindakan kolektif dalam mengatasi masalah sosio-ekonomi dunia, serta kebutuhan untuk memperkuat komunitas dunia dalam menanggulangi dampak rasionalitas-instrumental (Cochran 2004, 89-90). Dengan demikian, tugas pokok negara adalah membangun struktur kenegaraan yang mencita-citakan hubungan baru antara loyalitas nasional dan global (Linklater 2007, 21).

Pasca Perang Dingin, banyak negara menerapkan pola “top-down” sebagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah global. Seiring pembentukan berbagai macam rezim internasional yang memperhatikan isu tertentu seperti isu lingkungan hidup, kelaparan dan kemiskinan, demokratisasi, hak asasi manusia, kesetaraan jender, perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan, dan lain-lain. Kompleksitas masalah global dalam meningkatkan kesadaran bangsa-bangsa di dunia untuk bersatu dalam upaya penanggulangannya. Negara tidak lagi memandang masalah-masalah tersebut sebagai masalah yang dihadapi oleh negara yang bersangkutan saja, melainkan masalah bersama. Kesadaran inilah yang mendorong terbentuknya kerjasama untuk mengatasi masalah bersama.

MDGs dan Semangat Kosmopolitanisme

Solidaritas internasional dalam upaya untuk membantu persoalan masyarakat di negara-negara miskin pada dasarnya banyak mendapat perhatian dari komunitas internasional. Mereka percaya bahwa kemiskinan dapat memicu ketidak-stabilan tatanan masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas sistem internasional secara keseluruhan. Negara-negara maju sangat paham dengan konsekuensi tersebut. Mereka juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat di negara-negara miskin. Negara maju merancang skema bantuan ekonomi yang dikenal dengan Official Development Assistant (ODA), sebagai bentuk upaya untuk menanggulangi persoalan kemiskinan yang terjadi di dunia. Program bantuan ekonomi tersebut dikelola bersama di bawah naungan Development Assistant Committee (DAC) yang terdiri dari negara-negara industri maju atau Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Paket-paket bantuan ekonomi ke negara-negara miskin dan berkembang semakin meningkat dari waktu ke waktu, didorong oleh komitmen moral bahwa “yang kaya harus membantu yang miskin”. Dalam sebuah laporannya, DAC menyebutkan bahwa pada tahun 2000 jumlah penduduk miskin di dunia semakin bertambah. Sebagai negara industri maju, mereka punya kewajiban moral yang kuat untuk merespon kemiskinan ekstrim dan krisis kemanusiaan yang terjadi pada lebih dari

satu milyar umat manusia (OECD 1996, 1). Solidaritas negara-negara maju terhadap kemiskinan di berbagai belahan dunia mendorong mereka melakukan upaya pembangunan ekonomi, guna mengangkat taraf hidup kelompok masyarakat miskin. Solidaritas tersebut merupakan solidaritas yang bersifat lintas-batas, yang tidak mengenal sekat-sekat kedaulatan dan kepentingan nasional negara yang sempit.

Solidaritas global untuk menanggulangi masalah kemiskinan tidak terbatas pada komitmen negara-negara industri maju saja. Di tingkat global, PBB berinisiatif membentuk suatu program kerjasama di antara negara-negara anggota untuk membantu masyarakat miskin di berbagai belahan dunia. Pada tanggal 3 April 2000, PBB meluncurkan program Millenium Development Goals (MDGs) dalam upaya mengatasi masalah-masalah global. Sekjen PBB Kofi Annan menyampaikan tulisannya yang berjudul "*We the Peoples: The Role of the United Nations in the 21st Century*" sebelum peluncuran program tersebut dilakukan. Tulisan tersebut berisi tentang masalah-masalah yang dihadapi dunia akibat arus globalisasi serta peran yang dilakukan oleh PBB dalam upaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Dalam tulisan tersebut, Kofi Annan juga menjelaskan bahwa di satu sisi banyak masyarakat dunia yang tengah menikmati kemakmuran, di sisi lain banyak juga masyarakat di belahan dunia lainnya yang mengalami masalah kemiskinan. Hampir separuh populasi dunia hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dolar per hari. Sekitar 1,2 miliar manusia (yang 500 juta jiwa tinggal di Asia Selatan dan 300 juta jiwa di Afrika) bertahan hidup dengan pendapatan kurang dari 1 dolar per hari (Annan 2000, 19). Data tersebut juga diperkuat dengan adanya kondisi deprivasi sosio-ekonomi seperti masalah pengangguran, kesenjangan atau ketimpangan pendapatan, dan sebagainya. Kondisi-kondisi global tersebut tentu menjadi tantangan bagi PBB sebagai organisasi internasional.

Dalam hal ini, MDGs merupakan program yang dibuat untuk mengatasi masalah-masalah global yang mencakup 8 isu *low politics* meliputi: 1) kemiskinan dan kelaparan, 2) pendidikan, 3) kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, 4) mengurangi angka kematian bayi, 5) meningkatkan kesehatan ibu hamil, 6) memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, 7) masalah terkait lingkungan, dan 8) upaya pembangunan ekonomi. Meski demikian, isu yang paling menonjol dan menempati prioritas tertinggi program MDGs adalah isu kemiskinan. Kemiskinan merupakan isu krusial karena memiliki efek samping yang sangat luas, menyangkut isu-isu lainnya. Salah seorang yang turut menginisiasi MDGs, Jeffrey Sachs (2005, 226), menyatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah struktural. Dengan demikian, masyarakat di negara-negara miskin tetap miskin karena mereka

menghadapi permasalahan yang membuat mereka sulit memperbaiki kehidupannya. Oleh karena itu, perubahan struktural melalui program bantuan MDGs dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jeffrey Sachs juga menyatakan bahwa ada beberapa hal yang membuat negara bebas dari masalah kemiskinan, seperti infrastruktur yang memadai, kedekatan dengan negara kaya, lingkungan yang mendukung, sumber daya energi yang memadai, serta bebas dari penyakit. Tanggung-jawab komunitas internasional adalah memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung terjadinya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pun juga harus mengedepankan asas *pro-poor*, bukan *pro-capital*.

Sebagai wujud solidaritas global, MDGs menganjurkan agar komunitas internasional dapat bersatu untuk membantu masyarakat di negara-negara miskin. Kofi Annan (2000, 40) mengatakan bahwa komitmen dunia kepada kaum miskin bukan hanya sebuah bentuk kewajiban moral, melainkan juga kepentingan bersama. Semua pihak punya tanggung-jawab utama guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan. Menghapus kemiskinan adalah tantangan bagi semua. Kita tidak boleh gagal dalam hal ini. Kemiskinan dipandang sebagai perusak nilai-nilai kemanusiaan. Secara lebih lanjut Kofi Annan (2000, 77) juga mengatakan bahwa “kita harus membantu saudara-saudara kita yang tengah dilanda kemiskinan”.

Dengan berpegang pada komitmen untuk membantu yang lemah, solidaritas ini dapat menjadi pelengkap bagi DAC dalam memberikan bantuan, guna mendorong pembangunan di negara dunia ketiga. Penanggulangan masalah kemiskinan global tidak dapat dilakukan oleh negara-negara kaya saja. Semua pihak, termasuk negara miskin (negara penerima bantuan) juga punya kewajiban untuk melakukan upaya-upaya perbaikan taraf hidup bagi warga negaranya. Target menghapus kemiskinan global pada 2025 mendatang memerlukan kerjasama global antara negara kaya dan negara miskin. Negara miskin diharapkan memprioritaskan sebagian besar sumber daya yang dimilikinya untuk mengatasi kemiskinan. Sedangkan negara kaya harus membantu mereka keluar dari jaring kemiskinan (Sachs 2005, 266). MDGs menyediakan kerangka kerjasama bagi pemerintah, baik di negara kaya maupun di negara miskin, untuk dapat bersatu dalam upaya mencapai tujuan MDGs pada tahun 2025.

Kerangka kerjasama MDGs tersebut menunjukkan bahwa negara masih menjadi aktor penting dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan universal. Kewajiban mengurangi angka kemiskinan adalah kewajiban negara, bukan kewajiban masyarakat di negara tersebut (Priest 2005). Namun dalam hal ini, kewajiban moral dalam menanggulangi masalah kemiskinan melampaui batas-batas negara. Melalui upaya penerapan

program MDGs, dapat dilihat adanya bentuk empati komunitas internasional terhadap persoalan yang dihadapi oleh negara-negara lain. Komitmen moral ini mengikat negara-negara agar bekerjasama dalam membahas strategi penanggulangan kemiskinan global. Sejalan dengan argumen kosmopolitanisme, Jeffrey Sachs (2005, 226-227) menyatakan bahwa dalam upaya menanggulangi kemiskinan diperlukan kerjasama di antara “orang-orang yang tidak pernah bertemu sebelumnya dan tidak percaya antara satu dengan yang lain”. Ketika menghadapi masalah yang sama-kemiskinan global beserta ancaman-ancaman yang ditimbulkannya, negara-negara tidak lagi melihat kemiskinan dalam istilah kekuasaan maupun kepentingan nasional. Kemiskinan sudah menjadi isu kolektif yang menyatukan perbedaan kepentingan antar negara. Salah satu dampak positif MDGs di luar konteks kemanusiaan adalah mampu menjadi “lem perekat” bagi negara-negara yang sebelumnya memiliki hubungan yang tidak harmonis. Persamaan persepsi terhadap nilai moral menyangkut isu kemiskinan global merupakan bukti bahwa sekalipun terdapat perbedaan dan pertentangan antar negara, mereka masih dapat bersatu untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi ancaman bersama.

Sebagai sebuah tata-kelola global, MDGs dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan universal yaitu kebebasan, martabat, solidaritas, toleransi, dan kesetaraan antar umat manusia dan bangsa (Fukuda-Parr 2004, 395). Akses terhadap sumber daya ekonomi untuk menuju kemakmuran merupakan nilai universal yang diakui oleh seluruh bangsa. Terlepas dari adanya perbedaan ras, etnis, maupun budaya. PBB mengakui nilai-nilai universal bahwa semua individu di manapun berada, bebas memiliki keinginan (*freedom from want*) dan bebas dari ketakutan (*freedom from fear*). Bebas dalam memiliki keinginan erat kaitannya dengan kesejahteraan ekonomi sedangkan bebas dari rasa takut berhubungan dengan aspek keamanan. Dalam konteks itu, kemiskinan dianggap sebagai penghalang bagi tercapainya kebebasan untuk memiliki. Peran PBB sebagai organisasi internasional sangat penting untuk mempermudah akses individu terhadap sumber daya ekonomi dapat terjamin sepenuhnya. Dalam konteks ini pula, peran negara sebagai agen moral dapat turut-serta mendukung upaya pencapaian kesejahteraan semua bangsa di dunia. Ketika suatu negara memutuskan bergabung dengan PBB, secara otomatis negara tersebut mengakui dan menjalankan norma atau aturan, serta nilai kemanusiaan universal yang tercantum dalam Piagam PBB.

Dengan demikian, MDGs menjadi komitmen dan sebuah kesepakatan terbesar bagi negara-negara di dunia secara global, untuk mengurangi kemiskinan dan deprivasi kemanusiaan melalui tindakan kolaboratif yang belum pernah terjadi sebelumnya (Hulme 2009, 4). MDGs berbeda dengan komitmen global lainnya dalam hal keluasan aspek yang

ditangani dan upaya sistematis dalam hal pembiayaan, implementasi, dan evaluasi. MDGs merupakan bentuk upaya pengurangan dan atau pemberantasan kemiskinan global, yang menjadi kewajiban moral bagi semua negara dan institusi internasional (Hulme dan Fukuda-Parr 2009, 3). Kolektivisme MDGs mencerminkan solidaritas mekanis antar bangsa yang diikat oleh kesamaan identitas sebagai “warga dunia”, serta kesamaan kepentingan untuk mewujudkan dunia yang bebas dari permasalahan. Menolong masyarakat di negara-negara miskin tidak lagi dipandang sebagai hasil kalkulasi rasional menyangkut untung-rugi, tetapi tanggung-jawab sosial negara (*states social responsibility*) dalam komunitas internasional.

MGDs Sebagai Norma Universal

Hingga saat ini, hanya sedikit pihak yang mengetahui perkembangan MDGs menjadi norma universal. Meskipun pada dasarnya semua pemerintah dan individu di dunia sepakat bahwa kemiskinan merupakan permasalahan global yang harus diatasi bersama. Beberapa orang mungkin bertanya tentang bagaimana MDGs bisa menjadi tata-kelola global yang mampu mengikat semua negara di dunia? Mengapa baru sekarang-awal milenium ketiga ide tersebut muncul? Bukankah kemiskinan merupakan persoalan klasik? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengarah pada persoalan seputar bagaimana kemiskinan menjadi isu global dan tidak lagi menjadi hak eksklusif negara. Dengan demikian, kemiskinan mengglobal hingga MDGs diinternalisasi oleh semua negara di dunia.

Dalam sebuah artikel, Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink (1998) memberikan kerangka analisis untuk memahami bagaimana suatu norma muncul, menyebar, hingga diadopsi oleh aktor negara. Proses tersebut dikenal sebagai “daur hidup norma”. Dalam artikel tersebut juga dijelaskan mengenai proses pembentukan norma yang meliputi: fase kemunculan (*norms emergence*), penyebarluasan (*norms cascade*), dan internalisasi (*norms internalization*). Tahap-tahap tersebut berjalan secara linear sehingga tidak tepat disebut sebagai “norms life cycle”. Terlepas dari itu, bingkai analitis Finnemore dan Sikkink sangat bermanfaat untuk mengetahui pembentukan dan perkembangan norma MDGs.

David Hulme dan Sakiko Fukuda-Parr (2009) membuat penelitian yang menerapkan kerangka yang dibuat Finnemore dan Sikkink. Dalam artikelnya, Hulme dan Fukuda-Parr menyebutkan bahwa terdapat dua alasan mengapa MDGs membawa sebuah perubahan besar dalam hal penanganan masalah kemiskinan global. Pertama, sebelum MDGs disepakati oleh seluruh negara di dunia, masalah kemiskinan tidak

menjadi prioritas negara. Kedua, sebelum MDGs muncul, kemiskinan hanya dipandang secara monolitik, yaitu definisi miskin hanya dikaitkan dengan rendahnya pendapatan daripada multidimensi. Oleh sebab itu, kemunculan MDGs merupakan revolusi gagasan atau ide mengenai pentingnya membentuk tata-kelola global yang secara komprehensif mengatur pemberantasan kemiskinan di dunia.

Tahap pertama diawali dengan proses kemunculan norma. Sebelum MDGs menjadi paradigma baru dalam upaya pemberantasan kemiskinan global, para aktor bekerja keras dalam mengkampanyekan program-program sosial. Aktor tersebut terdiri dari individu, aktivis-aktivis LSM, dan gerakan sosial yang dalam terminologi konstruktivis disebut dengan Jaringan Advokasi Transnasional (Keck dan Sikkink 1998; Khagram et al. 2001). Beberapa aktor tersebut antara lain UNICEF (lembaga internasional yang mengurus masalah anak-anak), UNFPA (lembaga internasional yang mengurus masalah pangan), dan ICWH (lembaga internasional yang mengurus masalah kesehatan perempuan). Hingga pada akhirnya muncul upaya penyelesaian masalah kemiskinan dari pendekatan neoliberal yang dikenal dengan “program penyesuaian struktural” (*structural adjustment program*) ke pendekatan berbasis manusia (*people based approach*).

Ketika pendekatan pemberantasan kemiskinan tersebut masuk ke ranah PBB, norma yang menjadi cikal-bakal MDGs tersebut menjadi dominan. Ini adalah tahap “tipping point” yaitu tahap ketika para pemimpin pemerintah atau lembaga menerima sebuah norma. Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, menulis laporan berjudul “*We the Peoples: The Role of the United Nations in the 21st Century*” yang mencerminkan penerimaan Majelis Umum PBB terhadap gagasan baru tersebut. Beberapa individu juga berperan dalam merinci tujuan-tujuan dari MDGs yang kemudian dicantumkan dalam sejumlah laporan. Individu-individu tersebut berperan sebagai “message entrepreneur” -yang membedakan mereka dari “norms entrepreneur” karena tidak dimotivasi oleh komitmen idealis (Hulme dan Fukuda-Parr 2009, 15). Mereka hanya membantu menterjemahkan “norma global” Millenium Development (MD) menjadi Millenium Development Goals (MDGs) yang lebih konkret. Beberapa individu yang terlibat dalam pembuatan MDGs dan juga dikenal sebagai pengembang studi hubungan internasional, seperti John Gerrard Rugie (konstruktivis) dan Michael Doyle (liberalis).

Setelah norma MDGs diterima PBB, secara otomatis semua negara anggota PBB juga menerima norma tersebut. Hal ini berkaitan dengan tahap kedua dari proses perkembangan norma dari kerangka analisis Finnemore dan Sikkink yakni penyebarluasan. Proses penyebarluasan norma MDGs oleh negara-negara anggota PBB relatif mudah. Setelah itu, norma MDGs mengalami internalisasi dan diadopsi menjadi agenda

kebijakan nasional masing-masing negara anggota PBB. Pada tahap ketiga ini MDGs diadopsi dalam produk-produk kebijakan nasional seperti pernyataan kebijakan pemerintah, dokumentasi, dan laporan pemerintah. Dengan diadopsinya norma MDGs oleh semua negara maka semua negara memiliki persepsi dan komitmen yang sama dalam melihat kemiskinan sekaligus cara untuk menanggulangnya.

Simpulan

Pemikiran tradisional memandang fenomena global sebagai arena untuk mencapai kekuasaan dan kepentingan nasional negara. Meski demikian, ada dimensi moral yang kemudian dapat menggerakkan individu dan negara dalam merasakan dampak kemiskinan yang dialami oleh masyarakat di negara lain. Moralitas ini berakar dari nilai dan norma kemanusiaan universal yang diakui dan dianut oleh semua bangsa, terlepas dari sekat-sekat geografis, ideologis, ras, etnis, dan kultural. Semua bangsa yakin bahwa kemiskinan menghalangi setiap individu untuk meraih kesejahteraan dan kemakmuran. Dimensi etis dari kosmopolitan inilah yang sering kali termarginalkan dalam diskursus hubungan internasional kontemporer.

Melalui proses yang panjang, norma MDGs pada akhirnya mampu menggeser keberadaan norma neoliberal klasik. Pendekatan neoliberal terbukti gagal dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan. MDGs menekankan pada pendekatan berbasis kemanusiaan sebagai program pemberantasan kemiskinan. Komitmen itu lah yang tertuang dalam norma MDGs. Komitmen kosmopolitanisme yang termanifestasi dalam MDGs memberikan bukti konkret yang menunjukkan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai aktor yang rasional tetapi juga sebagai agen moral yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan global. Logika altruisme yang terkandung dalam MDGs didorong oleh keyakinan bahwa “yang kaya harus membantu yang miskin” dan “menolong orang miskin adalah kebaikan”. MDGs juga memperkuat asumsi kosmopolitan bahwa di balik segala perbedaan yang sering kali memicu konflik antar negara, ada dimensi etis yang dapat mempersatukan yaitu nilai-nilai seperti kebebasan, kesetaraan, martabat, toleransi, dan solidaritas. MDGs menjadi kerangka kerjasama untuk membangun solidaritas antar bangsa dalam memberantas kemiskinan global.

Daftar Pustaka

Buku

- Adler, Emanuel dan Michael Barnett (eds.), 1998. *Security Communities*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Annan, Kofi, 2000. *We the Peoples: The Role of the United Nations in the 21st Century*. New York: United Nations.
- Beitz, Charles, 1979. *Political Theory and International Relations*. New Jersey: Princeton University Press.
- Cochran, Molly, 2004. *Normative Theory in International Relations: A Pragmatic Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Keck, Margaret dan Kathryn Sikkink, 1998. *Activist Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca: Cornell University Press.
- Khagram, Sanjeev, et al. (eds.), 2001. *Restructuring World Politics: Transnational Social Movements, Networks, and Norms*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Linklater, Andrew, 2007. *Critical Theory and World Politics: Citizenship, Sovereignty, and Humanity*. London: Routledge.
- Miller, Lynn, 2006. *Agenda Politik Internasional* (terj. Daryatno, *Global Order: Values and Power in International Politics*). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sachs, Jeffrey, 2005. *The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time*. New York: Penguin Press.
- Waltz, Kenneth, 1979. *Theory of International Politics*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Wendt, Alexander, 1999. *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wolfers, Arnold, 1962. *Discord and Collaboration: Essays on International Politics*. Baltimore: John Hopkins University Press.

Artikel Jurnal

- Baban, Feyzi, 2006. "Living with Difference: Cosmopolitanism, Modernity, and Political Community", *Studies in Political Economy*, Spring, 77: 105-126.
- Bond, Patrick, 2006. "Global Governance Campaigning and MDGs: From Top-down to Bottom-up Anti-Poverty Work", *Third World Quarterly*, 27 (2): 339-354.
- Cohen, Marshall, 1984. "Moral Skepticism and International Relations", *Philosophy & Public Affairs*, Autumn, 13 (4): 299-346.
- Finnemore, Martha dan Kathryn Sikkink, 1998. "International Norm Dynamics and Political Change", *International Organization*, Autumn, 52 (4): 887-917.

- Fukuda-Parr, Sakiko, 2004. "Millennium Development Goals: Why They Matter", *Global Governance*, October-December, **10** (4): 395-402.
- Kennan, George, 1985. "Morality and Foreign Policy", *Foreign Affairs*, Winter, **64** (2): 205-218.
- Linklater, Andrew, 2007. "Distant Suffering and Cosmopolitan Obligations", *International Politics*, **44**: 19-36.
- Nelson, Paul, 2007. Human Rights, the Millennium Development Goals, and the Future of Development Cooperation", *World Development*, **35** (12): 2041-2055.
- Rosyidin, Mohamad, 2012. "Moralitas dalam Dunia yang Anarki: Bantuan Luar Negeri dalam Perspektif Konstruktivisme", *Jurnal Universitas Paramadina*, Desember, **9** (3): 517-533.
- Saith, Ashwani, 2006. "From Universal Values to Millennium Development Goals: Lost in Translation", *Development and Change*, **37** (6): 1167-1199.
- Walt, Stephen, 1985. "Alliance Formation and The Balance of World Power", *International Security*, Spring, **9** (4): 3-43.

Working Paper

- Alston, Philip, 2005. "A Human Rights Perspective on the Millenium Development Goals", dalam *Project Task Force on Poverty and Economic Development*.
- Hulme, David dan Sakiko Fukuda-Parr, 2009. "International Norm Dynamics and "the End of Poverty": Understanding the Millennium Development Goals (MDGs)", *Brooks World Poverty Institute Working Paper*, No. 96, June.
- Hulme, David, 2009. "The Millennium Development Goals (MDGs): A Short History of the World's Biggest Promise", *Brooks World Poverty Institute Working Paper*, No. 100, September.

Laporan Penelitian

- Andrews, Brandi Nikole, 2008. *Cosmopolitanism and Human Rights: Creating a Global Consciousness*. Tesis Magister. Stadtschlaining: European University for Peace Studies.

Artikel Online

- Development Assistance Committee*, 1996. "Shaping the 21st Century: The Contribution of Development Co-operation" [online]. dalam www.oecd.org/dataoecd/23/35/2508761.pdf. [diakses 19 Juni 2012].
- Gore, Charles, 2008. "The Global Development Cycle, MDGs and the Future of Poverty Reduction" [online]. dalam www.eadi.org/fileadmin/MDG_2015_Publications/Gore_PAPER.pdf. [diakses 19 Juni 2012].

Priest, George, 2005. "Reducing Global Poverty: Theory, Practice, and Reform" [online]. dalam www.law.yale.edu/documents/pdf/Reducing_Global_Poverty.pdf. [diakses 19 Juni 2012].